

MURĀBAḤAH, ANTARA TEORI DAN PRAKTEK
Muh. Sholihuddin
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstract: Islamic bankers assume that an Islamic bank is a bank that is free from ribā. Furthermore, conventional banks as the bank alleges that does not comply with the principles of Islamic prinsip. This naturally raises the question, what is like that. Some scientists doubt muslim statement. In fact, there is a presumption of Islamic banks is just trickery to gain profit. Also some say Islamic banking and conventional banking is not just twins, but are conjoined twins. One contract that much attention is *murābahah*. Akad *murābahah* is a superior product in Islamic banks as a clear advantage and the risk of loss can be minimized. According to the study, 60-70% of the amount of financing extended by Islamic banks (both Islamic banks and BMT). Of course, this is reasonable since the establishment of Islamic banks, as conventional banks are profit-oriented. However, Islamic banks do not practice it much different from conventional banks, both do not want to lose. Because profit is determined by Islamic banks, where customers can not haggle Profit must be obtained. This ultimately hurt the principle of voluntarism and mutual fairness in the contract. If it is lost, then the contract does is *bāṭil* and *zālim*.

Keyword: *murābahah*, theory, practice

Pendahuluan

Salah seorang Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dan juga sedang menjabat posisi penting di Bank Mini Syariah (BMS), pernah bertanya yang bernuansa pernyataan “bagaimana dosen-dosen IAIN ini, mereka paham tentang haramnya bunga bank kok masih pinjam uang di BRI, BTN (Bank Konvensional)”.

Pernyataan di atas patut untuk dicermati karena beberapa alasan :

1. Yang membuat pernyataan adalah seorang pejabat Bank Syariah, yaitu Bank Mini Syariah (BMS). Jang-jangan pernyataan itu merupakan bagian dari promosi BMS di lingkungan IAIN. Tentu semua mafhum, bahwa selain BMS terdapat lembaga keuangan lain yang juga menyediakan pembiayaan, seperti BTN dan Koperasi “al-Kautsar” di IAIN.

Jadi, relatif pernyataan tersebut tidak bebas kepentingan alias tidak netral.

2. Status hukum bunga bank sampai saat ini belum ada kata sepakat alias masih diperdebatkan di antara para ulama tentang keharamannya. Jadi, sungguh terlalu berani jika seorang sudah menganggap final keharaman bunga bank.

Beberapa intelektual muslim, seperti Fazlur Rahman menyatakan *halāl*, karena bunga bank berbeda dengan riba. Menurut Rahman, bunga bank tidak bisa disamakan dengan riba. Sebab filosofi keberadaan bank dalam sistem pembangunan nasional sebuah negara modern, di mana bunga merupakan salah satu unsur di dalamnya, adalah sebagai *agent of change*. Dengan begitu bank tidak bisa disamakan dengan riba yang bergerak di atas motif keperluan konsumtif-individual. Bunga bank memang tidak sempurna, tapi tidak bisa lantas serta merta disamakan dengan riba.¹ Demikian juga dengan Sayid Tāntawī, seorang mufti dari Mesir. Ibrahim ‘Abdullāh al-Naṣīr menyatakan bahwa sistem perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Quran. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nas-nas yang pasti yang terdapat dalam al-Quran tentang pengharaman riba’.² Di Indonesia pun demikian, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang membagi hukum bunga bank menjadi tiga, yaitu *haram*, *halal*, dan *syubhat*.³ Sedangkan tokoh yang menghalalkan seperti Nurcholish Madjid, A. Hasan, Alwi Shihab, dan Munawir Sadzali. Munawir Sadzali memberikan alasan, *pertama*, menganalogkan dengan meminum minuman keras, di mana keharamannya bukan karena di dalamnya tidak ada sama sekali manfaat. Tetapi Islam, mengharamkannya lebih karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh minuman keras jauh lebih besar dari manfaatnya. Sama dengan sistem bunga bank, di mana dalam pelaksanaannya tidak

¹ Malja Abror, *Haul Pemikiran Fazlurrahman: Mengenang 20 Tahun Wafatnya Sang Pembaru Islam*, <http://islamlib.com/> diakses 11 Mei 2011.

² Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Perbankan*, <http://amir-bisa.blog.friendster.com/> diakses 30 April 2011.

³ <http://www.tempointeraktif.com/> diakses 11 Mei 2011.

selalu baik dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank. Namun, nasabah yang tertolong jauh lebih banyak dari yang dirugikan oleh bank. *Kedua*, keberadaan bank dalam menggerakkan roda ekonomi Negara dan masyarakat mutlak diperlukan. Dalam perkembangannya, bank dengan sistem bunga merupakan lembaga keuangan yang paling handal dan teruji.⁴

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang bunga bank sebagai *ribā* atau bukan. Namun, untuk melihat sejauh mana praktik perbankan syariah dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi-keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, *an-tarāḍin*, bebas dari *ribā*, dan lain-lain. hal ini, karena beberapa komentar dari banyak pihak yang meragukan ke-syariah-an bank syariah, seperti Umar Ibrahim Vadillo yang menyatakan, “Bank Islam” merupakan “Kuda Troya” yang disusupkan oleh para musuh Islam ke dalam *Dar al-Islam*.⁵ Ahamed Kameel Mydin Meera, penulis buku *Perampokan Bangsa-Bangsa* (Mizan, 2010) menyatakan, alih-alih menjadi penyedia solusi, bank-bank Islam juga bertanggung jawab terhadap masalah sosial-ekonomi yang terjadi karena sistem keuangan fiat (*ribā*). Lebih lanjut dia mengungkapkan, perbankan syariah dan perbankan konvensional itu bukan cuma bersaudara kembar, tetapi adalah kembar siam.⁶ Lihat juga umpamanya, Zaim Saidi dalam bukunya yang berjudul “Tidak Syar’inya Bank Syariah” secara detail membongkar kepalsuan-kepalsuan dalam perbankan syariah.

Dalam tulisan ini, akan mencoba mengurai secara khusus salah produk unggulan bank syariah, yaitu *murābahah*. Hal ini, karena akad ini merupakan akad yang paling banyak disukai nasabah dan paling banyak mendulang keuntungan bagi bank syariah.

⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 65.

⁵ [http:// www.goodreads.com/book/show/11456238-tidak-syar-inya-bank-syariah-di-indonesia](http://www.goodreads.com/book/show/11456238-tidak-syar-inya-bank-syariah-di-indonesia), diakses 21 September 2012.

⁶ [http:// www.wakalanusantara.com/detailurl/Memahami.Tidak.Syarinya.Bank.Syariah/683](http://www.wakalanusantara.com/detailurl/Memahami.Tidak.Syarinya.Bank.Syariah/683), diakses 21 September 2012.

Murābahah dalam Perbankan Syariah

Kata *murābahah* berasal dari kata *al-ribḥ* atau *al-rabḥ* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribḥ* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan.⁷ Al-Khaṭṭabī menyebutkan dua variasi lain kata tersebut dengan makna yang sama, yaitu *al-ribāh* dan *al-ribāḥah*.⁸

Di dalam al-Qur'an kata *ribḥ* dengan makna keuntungan dapat dilihat pada surat al-Baqārah [2] ayat 16 berikut:

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*⁹

Dalam khazanah al-Qur'an, yang tentu saja tidak berbicara dalam konteks hubungan material murni, kata *ribḥ* juga sering dipersandingkan maknanya dengan kata *al-faḍl*. Hal itu misalnya terlihat dalam firman Allah surat Ali 'Imrān [3] ayat 174 berikut:

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو

فضل عظيم

*Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*¹⁰

⁷ Muḥammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jūz 2, (Beirūt: Dār Ṣādir, t.th.), 442. Muḥammad ibn 'Abi Bakar ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥāh*, Jūz 1, (Beirūt: Maktabah Libanan Nāshirun, 1995), 97. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 463.

⁸ Muḥammad ibn Muḥamamd ibn Ibrahim al-Khaṭṭabī al-Buṣfī Abū Sulaimān, *Gharīb al-Ḥadīṡs (al-Gharīb li al-Khaṭṭabī)*, Jūz 2, (Makkah al-Mukarramah: Jāmi'ah Umm al-Qurā', 1402 H), 228.

⁹ QS. al-Baqarah [2] : 16.

¹⁰ QS. Ali Imran [3] : 174.

Selain kata *al-faḍl*, kata *al-ribḥ* juga memiliki sinonim lain, yaitu *al-ghunm* yang menjadi akar dari kata *al-ghanīmah*.¹¹ Kata *al-ghunm* ini sendiri memang digunakan Rasulullah SAW. dengan makna keuntungan pada hadith yang menejadi salah satu dasar *rahn*, yang berbunyi sebagai berikut:

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه البيهقي والدارقطني والحاكم والشافعي)

Dari Sa'īd ibn al-Musayyab, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya." (HR. al-Baiḥaqī, al-Dāruqṭnī, al-Ḥakīm, dan al-Shāfi'ī)

Secara istilah, menurut Waḥbah al-Zuhailī, *murābahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.¹² Secara praktis yang dimaksud dengan *murābahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan *murābahah* diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).¹³ Abdullah Saeed mendefinisikan *murābahah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.¹⁴

¹¹ 'Abdullāh ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainūrī Abū Muḥammad, *Gharīb al-Ḥadīth (al-Gharīb li Ibn Qutaibah)*, Jūz 1, (Baghdād: Maṭba'ah al-'Aniy, 1397 H), 229.

¹² Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 703.

¹³ Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 25.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

Pada dasarnya, terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murābahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini. Menurut ulama Ḥanāfiyah, yang dimaksud dengan *murābahah* adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan. Ulama Mālikiyah mengemukakan sebagai jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad. Dalam pandangan ulama Mālikiyah, seperti disebutkan al-'Abdariy, jual beli *murābahah* juga terbagi dua, yaitu: *pertama*, jual beli dengan tambahan (keuntungan) yang jelas terhadap modal awal. Misalnya, keuntungan satu dirham terhadap satu dirham modal awal dan tambahan satu dirham terhadap sepuluh dirham modal awal dan selanjutnya, bisa lebih banyak atau kurang, sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, jual beli dengan tambahan keuntungan yang disebutkan dan disepakati terhadap keseluruhan harga awal. Sementara itu, ulama Shāfi'iyah mendefinisikan *murābahah* itu dengan jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya. Sedang menurut ulama Hanābilah, yang dimaksud *murābahah* adalah jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui.¹⁵

Menurut Adiwarman A. Karim, bahwa sebenarnya produk pembiayaan *bai' bi thaman ājil* secara *fiqh* adalah *bai' bi thaman ājil* yang *murābahah*. Adapun *murābahah*, secara *fiqh* pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bi thaman ājil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya diperbankan, *murābahah* yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah *murābahah* yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *murābahah* secara *fiqh* adalah *murābahah*

¹⁵ Husni, *Konsep Murābahah dalam Wacana Fiqih*, <http://www.fikihonline.co.cc/> (23 April 2011).

yang *baī' bi thaman ājil*.¹⁶ Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'iy menamai transaksi seperti ini dengan istilah *al-amr bi al-shirā'*.¹⁷

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murābahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murābahah* itu adalah **adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual.** Dalam hal ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murābahah* yang sesungguhnya. Dengan kata lain, *murābahah* adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengutarakan dengan jelas kepada pembeli berapa harga jual dan berapa margin objek jual beli sehingga terjadi transparansi dan apabila terjadi saling menyetujui (*'an-tarāḍin*) maka dengan syarat dan rukun yang telah dipenuhi barulah dapat terjadi jual beli.¹⁸

Misalnya tuan A bermaksud mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil seharga Rp. 100.000.000.-, kemudian mengajukan pembiayaan ke Bank Syari'ah B. Lalu Bank syari'ah B menyampaikan penawaran sebagai berikut :

1. Harga beli : Rp. 100.000.000.-
2. Margin *Murābahah* : Rp 20.000.000.-
3. Harga Jual : Rp. 120.000.000.-

Kemudian Tuan A menyetujui maka terjadilah jual beli *murābahah* sehingga hutang tuan A kepada Bank adalah sebesar harga jual yaitu Rp.120.000.000.- yang dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati.

Dalam akad ini, menurut Wahbah az-Zuhaili ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah :

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

¹⁷ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kuliyah al-Azhāriyah, 1961), Jūz III, 93.

¹⁸ Ahmad Satiri, *Problema Hukum Transaksi Murābahah dalam Aplikasi Bank Syari'ah*, <http://www.pa-tigaraksa.net/i> di akses 27 April 2011.

1. Diketahuinya harga pokok Dalam jual beli *murābahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan di jual kepada pembeli untuk menghindari terjadi transaksi yang tidak jelas (*gharār*) di antara kedua belah pihak.
2. Diketahuinya keuntungan yang ditetapkan Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (marjin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang di jual, dan hal itu merupakan unsure terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an-tarāḍin*) di antara kedua belah pihak.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.¹⁹

Dengan adanya transaksi jual beli *murābahah* ini maka akad yang dilakukan antara bank dan nasabah berimplikasi kepada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Bank dan Nasabah, yaitu :

1. Bank berkewajiban menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah baik dengan cara membelikan langsung atau meminta nasabah untuk membantu membelikan (*wakalah*) barang yang dibutuhkannya
2. Bank berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada saat akad sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah
3. Bank harus transparan mengenai harga beli sebenarnya barang tersebut.
4. Nasabah berkewajiban membayar kepada nasabah sebesar harga jual yang telah disepakati baik dengan cara cara yang telah disepakati pula misalnya dengan cara tunai atau angsuran.
5. Nasabah dapat menolak/membatalkan jual beli sebelum ditandatanganinya akad pembiayaan.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 705.

6. Nasabah dapat memberikan uang muka kepada bank yang diperhitungkan sebagai pengurang harga beli dari bank.
7. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menjamin kelancaran pembayaran angsurannya.²⁰

Pengalaman penulis dan beberapa informasi dari nasabah, bahwa keuntungan yang mestinya disepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah tidak terjadi. Bank telah menetapkan keuntungan (*fixed profit*) yang didapat oleh bank. Sedangkan nasabah tidak bisa menawar keuntungan yang diperoleh oleh bank. Tentu hal ini menyalahi azaz kontrak atau transaksi syariah, yaitu kesukarelaan (*'an-tarāḍin*) dan keadilan (*al-'adālah*).

Sebagaimana dalam hukum bisnis Islam (fiqih muamalah), bahwa suatu transaksi harus memenuhi unsur-unsur akad atau rukun dan syarat akad.²¹ Jika, hal ini tidak terpenuhi, maka menjadi rusak atau batal akad tersebut. Dan salah satu syarat dalam akad adalah adanya kesukarelaan (*taradin*). Tidak sah, akad yang ada unsur pemaksaan.²² Firman Allah dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 29 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

²⁰ Ahmad Satiri, *Problema Hukum Transaksi Murābahah dalam Aplikasi Bank Syari'ah*, <http://www.pa-tigaraksa.net/i> di akses 27 April 2011

²¹ Akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Muḥammad Salām Madkūr, *al-Madkhāl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-'Arābiyah, 1963), 506.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: al-Amzah, 2010), 39.

²³ QS. al-Nisā' [4] : 29.

Oleh karena itu, berdasarkan ayat di atas segala transaksi harus didasarkan pada kesukarelaan atau keridaan diantara pihak yang bertransaksi. Apabila, dalam transaksi ini tidak terpenuhi maka sama artinya memakan harta dengan cara *baṭil*.²⁴ Demikian juga, dalam transaksi harus adil. Tidak boleh salah satu pihak menentukan harga atau keuntungan sepihak tanpa memperhatikan pihak yang lainnya. Jika terjadi, maka sama saja dengan berbuat *zalim*.

Landasan Hukum Akad *Murābahah*

Dalil yang menjadi rujukan akad *murābahah* adalah QS. al-Baqarah [2]: 275,

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".²⁵

Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Mājah).

Berdasarkan ini, para ulama mengemukakan kehalalan *murābahah* karena keumuman dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli dalam skala umum. Ijma kaum muslimin menjadi landasan kebolehan *murābahah* ini, karena jual beli ini juga dilakukan di berbagai negeri dan setiap masa. Orang yang tidak memiliki ketrampilan jual beli dapat bergantung kepada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan menjualnya dengan keuntungan yang logis sesuai kesepakatan.²⁶

Di sini juga adat dapat dijadikan dasar bagi kebolehan *murābahah*. Dalam hal ini, berlakulah kaidah yang didasarkan pada hadis Nabi berikut:

²⁴ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 93.

²⁵ QS. al-Baqarah [2]: 275.

²⁶ Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ ash-Ṣawī, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198-199.

عن عبد الله قال ما رأى المسلمون حسنا فهو الله حسن وما رآه
المسلمون سيئا فهو ثم الله سيء (رواه الحاكم)

Dari 'Abdillah, ia berkata: "Semua yang dipandang umat Islam sebagai baik, maka hal itu juga baik dalam pandang Allah. Sedang yang dipandang umat Islam buruk, maka dalam pandangan Allah hal itu juga buruk". (HR. al-Hakim).

Menurut Ibn Rushd, *murābahah* tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli *murābahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imām Mālik dan Imām Shāfi'i mengatakan bahwa jual beli *murābahah* itu sah menurut hukum, walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadith.²⁷ Imām Mālik mendukung faliditasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Menurut Imām Mālik, penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya, bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata, "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah".²⁸ Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang *murābahah*, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murābahah* pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau dalam Hadith yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan *murābahah* berdasarkan landasan lain.

²⁷ Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid II, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), 161.

²⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 138.

Menghindari *Shubhāt* dalam *Murābahah*

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Syariah sendiri merupakan usaha yang *profit oriented*, tetapi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa dalam berbisnis harus sesuai dengan panduan syariah dan memperhatikan kehidupan dunia serta akhirat secara seimbang. Perlu diingatkan mengenai salah satu perbedaan utama antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah digantikannya instrumen bunga dengan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*). Hal inilah yang tentunya juga mencirikan perbedaan Bank Syariah dengan lainnya.²⁹

Hal yang membuat gencarnya tuduhan bahwa Bank Syariah hanya berlabel syariah saja sedangkan isinya sama saja dengan konvensional adalah besarnya proporsi pembiayaan *murābahah* atau *baī' bi thaman ājil* yang berbasis *fixed margin*, sekaligus penyimpangan yang dilakukan Bank Syariah dalam menerapkan akad jual beli ini. Data sampai saat ini menunjukkan bahwa proporsi akad *murābahah* menguasai sekitar 60-70% jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah (baik Bank Syariah maupun BMT). Keadaan ini memang tidak hanya menjangkiti Bank Syariah di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.³⁰

Secara *fiqh*, tidak ada aturan yang melarang *murābahah* jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Akan tetapi dalam prakteknya di Bank Syariah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan. Misalnya pertama, penentuan margin/mark up sepenuhnya dilakukan oleh Bank Syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada transparansi dan keadilan antara penjual (Bank Syariah) dan pembeli (nasabah). Bank Syariah seharusnya secara fair menginformasikan tentang harga pokok barang dan variabel yang menentukan margin keuntungan untuk kemudian ditawarkan kepada nasabah. Proses keterbukaan dan tawar-

²⁹ http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-antara-cita-dan-fakta_9787.html, diakses 28 April 2011.

³⁰ <http://ekisopini.blogspot.com/2009> diakses 28 April 2011.

menawar inilah yang akhirnya melahirkan sikap kerelaan kedua belah pihak yang itu berbeda dengan kredit konvensional.

Biasanya nasabah memang akan membandingkan tingkat margin dengan ekuivalen tingkat persen bunga pada kredit. Di sini pihak Bank Syariah harus berhati-hati dalam menerangkan permasalahan penting ini, jangan langsung menyebut ekuivalen rate tetapi harus diterangkan prosesnya terlebih dahulu. Sekali lagi proses penentuan margin di atas dapat membantu, karena margin yang ditawarkan Bank Syariah berasal dari biaya riil dan seharusnya tidak di atas tingkat bunga yang ditetapkan serta merta (tidak riil) oleh Bank konvensional. Nasabah tentunya akan memahami dan menyadari perbedaan antara akad yang syar'i dan akad yang tidak syar'i. Juga kebanyakan Bank Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tentu menyimpang dari aturan fiqh, karena ada dua transaksi dalam satu akad yaitu wakalah dan *murābahah*. Di samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh Bank Syariah.³¹

Menurut Anton Prabowo,³² dalam analisisnya tentang bunga bank konvensional dan keuntungan dalam akad *murābahah* di bank syariah sesungguhnya tidak beda atau sama saja. Hal ini didasarkan beberapa alasan:

1. Biaya (Harga) Untuk Pembiayaan

Pembiayaan *murābahah* dengan sistem *mark-up*nya adalah sama dengan pinjaman yang berdasarkan bunga atau bahkan dapat terjadi lebih besar (mahal). Di mana dalam pembiayaan berdasarkan penetapan suku bunga tertentu dalam pinjaman bank konvensional, pihak bankir ketika akan memberikan pinjaman hanya cukup diberikan data-data finansial yang relevan untuk menilai posisi keuangan nasabah dan menilai proyek yang dimohonkan untuk

³¹ <http://ekisopini.blogspot.com/2009> diakses 28 April 2011.

³² Naili Rahmawati, *Mekanisme Pembiayaan Murābahah*, <http://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/mekanisme-pembiayaan-murabahah.pdf>, diakses 30 April 2011.

dibiayai. Sementara itu dalam pembiayaan *murābahah*, pihak bankir atau personil bank perlu untuk terlibat lebih jauh memberikan pembiayaan ini, di mana dibutuhkan adanya penelitian pasar yang memakan biaya, kertas kerja yang dihasilkan dari proses permintaan pembiayaan, melakukan kontak dengan penyalur, penanganan dokumen ataupun melakukan pemantauan yang terus menerus terhadap perkembangan penjualan barang-barang *murābahah* setelah diberikan kepada para nasabahnya.

2. Resiko Dalam Pembiayaan

a. Resiko yang terkait dengan barang

Seorang nasabah menurut kajian fiqih Islam berhak menolak barang-barang yang rusak atau kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Karena itu, dalam setiap kontrak transaksi *murābahah*, biaya asuransi merupakan salah satu biaya yang harus ditanggung oleh nasabah sebagai biaya yang ditambahkan pada pengeluaran-pengeluaran *murābahah* untuk mencapai total harga barang dan sebagai dasar bagi penentuan jumlah *mark-up*nya.

Kondisi ini memang berbeda dengan apa yang menjadi dasar dari penetapan suku bunga dalam suatu pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional kepada debiturnya yang memang bersifat pinjaman murni semata. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri jika di dalam pembiayaan *murābahah* ini *mark-up* yang ada ataupun total pengembalian yang harus dikeluarkan oleh nasabah *murābahah* bisa lebih besar dari suku bunga pinjaman bank konvensional.

b. Resiko yang terkait dengan pembayaran

Kaitannya dengan resiko yang terkait dengan pembayaran ini atau kemungkinan penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya, bank Islam membedakannya sebagai berikut :

- 1) Jika tidak adanya pembayaran atau ketidak mampuan seorang nasabah dalam membayar diakibatkan oleh adanya faktor-faktor di luar kemampuan nasabah

untuk mengontrolnya, maka bank Islam secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang pembayaran hutang tersebut.

- 2) Jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu dan tidak melakukannya, maka bank Islam dalam kondisi ini menggunakan sistem denda kepada nasabahnya, yang jumlahnya disesuaikan dengan “tingkat laba yang wajar” pada dana bank yang diinvestasikan sebagai opportunity cost (biaya untuk menutupi peluang yang hilang) dari modal tersebut.
- 3) Jika pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan, maka bank Islam dalam sebagian besar prakteknya akan menyita jaminan yang diberikan beserta barang-barang yang diserahkan kepada nasabah.

Dengan demikian, bank syariah dalam menyikapi resiko pembayaran yang timbul dari pinjaman *murābahah* yang diberikan, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional ketika debiturnya tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjamannya sesuai kontrak yang dibuat, seperti adanya penjadwalan hutang ataupun semacam denda yang diberikan. Termasuk adanya keharusan untuk mengajukan jaminan dari pinjaman yang diajukan, untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo.

3. Hubungan Antara Bank dan Pembeli

Dalam *murābahah*, secara tidak langsung kontrak jual beli yang terjadi membawa suatu hubungan kreditur-debitur antara pihak bank dengan nasabah. Di mana si pembeli (nasabah) menyetujui untuk membayar harga barang ditambah jumlah mark-up secara angsuran, termasuk tanggal jatuh tempo angsuran yang ditentukan dalam kontrak.

Dengan demikian, ketika pihak bank dan nasabah menyepakati kontrak jual beli ini, harga jual yang diberikan menjadi tanggungan hutang nasabah kepada

bank bersangkutan, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan antara seorang kreditur dan debitur yang tidak ada bedanya dengan hubungan yang terjadi pada kontrak pinjaman di bank konvensional.

4. Penyelesaian Hutang

Di perbankan konvensional, pinjaman yang diberikan melalui sistem bunga pada umumnya akan menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, baik si debitur mampu membayar atau tidak. Sementara itu di perbankan Islam seharusnya tidak demikian adanya, tergantung pada kondisi ketidak-mampuan debitur dalam membayar pinjamannya tersebut. Jika seorang debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak perbankan harus memberi kelonggaran (toleransi) untuk melunasinya sesuai dengan perintah al-Qur'an dalam surat al-Baqārah ayat 280.

Penundaan semacam dalam inti konsepnya harus diberikan tanpa melalui penambahan beban atau semacamnya seperti adanya denda dan sebagainya atas waktu yang diberikan untuk pembayaran tersebut. Hanya saja dalam praktek yang terjadi, sebagian besar bank-bank Islam dengan dukungan Dewan Syariah mereka telah mempersempit penafsiran perintah kandungan ayat tersebut. Menurut mereka, penerapan perintah tersebut secara umum dapat memberikan celah kepada para debitur untuk sengaja lalai untuk melunasi hutangnya, padahal mereka mampu untuk melunasinya.

Dengan melihat kenyataan seperti ini, maka wajar jika tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada bank syariah sebagai bank syariah hanya bajunya saja. Sedangkan, dalam praktek tidak jauh beda dengan bank konvensional. Dengan kata lain, praktek *murābahah* di bank syariah sekarang ini merupakan akad *ribawi*, akad srigala berbulu domba. Oleh karena itu, tidaklah salah jika Syaikh Ibnu 'Utsaimin melarang transaksi ini dengan alasan bahwa akad tersebut adalah tipu daya menuju riba dan beliau memasukkan akad ini ke dalam sistem '*inah*

bahkan lebih parah lagi. Hakikat *murābahah* adalah pinjam meminjam uang dengan bunga di tengah-tengah ada sebuah barang sebagai formalitas.³³

Kesimpulan

Akad *murābahah* merupakan produk unggulan di bank syariah karena keuntungan jelas dan resiko kerugian dapat diminimalisir. Berdasarkan penelitian, 60-70% jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah (baik Bank Syariah maupun BMT). Tentu, hal ini wajar karena berdirinya bank syariah sebagaimana bank konvensional adalah *profit oriented*.

Namun, prakteknya justru bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional, sama-sama tidak ingin rugi. Karena, keuntungan sudah ditetapkan oleh bank syariah, di mana nasabah tidak bisa melakukan tawar-menawar keuntungan yang harus diperoleh. Hal ini pada akhirnya mencederai azas saling kesukarelaan dan keadilan dalam akad. Jika hilang, maka akad yang dilakukan adalah *baṭil* dan *ẓālim*. Oleh karena itu, *murābahah* oleh sebagian pihak dianggap akak tipu daya yang jauh dari spirit syariah. Bahkan, secara umum ada anggapan, bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional itu bukan cuma bersaudara kembar, tetapi adalah kembar siam.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: al-Amzah, 2010.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

³³ Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, *Sistem Murābahah*, www.asysyariah.com, diakses 27 April 2011.

- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Madkūr, Muḥammad Salām. *al-Madkhāl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arābiyah, 1963.
- Manzūr, Muḥammad ibn Mukram ibn. *Lisān al-‘Arab*, Jūz 2. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.
- Muḥammad, ‘Abdullāh ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainu’rī Abū. *Gharīb al-Ḥadīth (al-Gharīb li Ibn Qutaibah)*, Jūz 1. Baghdād: Maṭba‘ah al-‘Aniy, 1397 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Perwataatmadja, Karanaen A. dan Muhammad Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Rāzī (al), Muḥammad ibn ‘Abi Bakar ibn ‘Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Ṣaḥāh*, Jūz 1. Beirut: Maktabah Libanan Nāshirun, 1995.
- Ṣawī (al), Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Shāfi‘ī (al), Abū Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs *al-Umm*, Jūz III. Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhāriyah, 1961.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sulaimān, Muḥammad ibn Muḥamad ibn Ibrahim al-Khaṭṭabī al-Buṣfī Abū. *Gharīb al-Ḥadīth (al-Gharīb li al-Khaṭṭabī)*, Jūz 2. Makkah al-Mukarramah: Jāmi‘ah Umm al-Qurā’, 1402 H.

Zuhaiġi (al), Waḥbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Abror, Malja. *Haul Pemikiran Fazlurrahman: Mengenang 20 Tahun Wafatnya Sang Pembaru Islam*, <http://islamlib.com/> diakses 11 Mei 2011.

Afifuddin, Abu Abdillah Muhammad. "Sistem Murābahah". www.asysyariah.com, diakses 27 April 2011.

Husni, "Konsep Murābahah dalam Wacana Fiqih". <http://www.fikihonline.co.cc/>, (23 April 2011).

Rahmawati, Naili. "Mekanisme Pembiayaan Murābahah". <http://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/mekanisme-pembiayaan-murabahah.pdf>, diakses 30 April 2011.

Satiri, Ahmad. "Problema Hukum Transaksi Murābahah dalam Aplikasi Bank Syari'ah". <http://www.pa-tigaraksa.net/i>, diakses 27 April 2011.

Zuhri, Muhammad. "Riba dalam Al-Quran dan Perbankan", <http://amir-bisa.blog.friendster.com/>, diakses 30 April 2011.

<http://ekisopini.blogspot.com/2009> diakses 28 April 2011.

http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-antara-cita-dan-fakta_9787.html, diakses 28 April 2011.

<http://www.goodreads.com/book/show/11456238-tidak-syar-inya-bank-syariah-di-indonesia>, diakses 21 September 2012.

<http://www.tempointeraktif.com/> diakses 11 Mei 2011.

<http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Memahami.Tidak.Syarinya.Bank.Syariah/683>, diakses 21 September 2012.